

KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 32/POJK.04/2015 JO NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN POJK NO.42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN



PT YELOOO INTEGRA DATANET TBK
("Perseroan")



YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang penyewaan modem termasuk penjualan data untuk konektivitas
Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat:

Jl. Alaydrus No.66 BC

Petojo Utara, Gambir

Jakarta Pusat 10150

Telepon: +62 21 6317523

Website: www.passpod.com

Email: corsec@passpod.com

Kantor Operasional:

AXA Tower Lantai 28 Suite 6-7

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan

Jakarta Selatan

Email: corsec@passpod.com

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN

APABILA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta 13 Mei 2022 dan diperbaiki tanggal 2 Juni 2022, 22 Juni 2022 dan 12 Juli 2022

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan sehubungan dengan :

1. Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per saham.
2. Rencana Perseroan untuk menerima pinjaman sebanyak Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dari PT Artalindo Semesta Nusantara ("ASN") yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan sebagaimana dalam Perjanjian Pengakuan Utang Piutang yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup antara Perseroan dengan ASN tanggal 30 Mei 2022.
3. Rencana pemberian pinjaman sebanyak Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada PT Telemedia Komunikasi Pratama ("TKP") yang merupakan entitas anak Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,67% (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh persen) dari seluruh saham dalam TKP dan pembayaran deposit atau jaminan sewa aset jaringan kabel serat optik sebanyak-banyaknya Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) oleh TKP kepada PT Gemilang Lintang Nusantara ("GLN").
4. Rencana sewa jaringan kabel serat optik (*fiber optic*) maksimal sebanyak Rp1.474.233.600.000,- (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah).

Rencana atas rangkaian transaksi pada poin nomor 2, 3 dan 4 tersebut di atas saling terkait dan merupakan transaksi yang berkesinambungan dan merupakan satu kesatuan transaksi, sehingga dalam pengambilan keputusan transaksi tersebut akan memperhatikan ketentuan POJK 17/2020. Ketentuan penggunaan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPS Independen**") yang akan digunakan dan diuraikan lebih lanjut bersamaan dengan rencana PMHMETD di bagian "Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan" di Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan berencana untuk melakukan rencana PMHMETD dan transaksi tersebut diatas dengan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan RUPS Independen yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2022.

Dalam menjalankan rencana ini, Perseroan senantiasa memperhatikan dan memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia terutama peraturan pasar modal Indonesia. Sampai saat ini tidak terdapat ketentuan hukum atau persetujuan dari pihak lain selain OJK yang harus dipenuhi.

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD")

1. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD, dengan perhitungan rasio setiap pemegang 1 (satu) saham lama berhak memperoleh 8 (delapan) HMETD yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II").

PUT II ini tidak menyebabkan terjadinya perubahan pengendali di Perseroan.

2. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan melalui PMHMETD dan akan dilaksanakan segera setelah Perseroan memperoleh (i) persetujuan dari RUPSLB yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2022 dan (ii) pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Pernyataan Pendaftaran Perseroan sehubungan dengan PMHMETD ini. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 angka (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan antara lain adalah (i) memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga dapat memberikan pinjaman pada entitas anak untuk mengembangkan usaha di bidang *internet service provider* melalui jaringan kabel *fiber optic*, serta (ii) meningkatkan jumlah saham yang beredar, sehingga dengan adanya penambahan modal dengan memberikan HMETD diharapkan menambah jumlah saham di pasar dan akan meningkatkan likuiditas saham di Perseroan.

ASN selaku pemegang saham utama dan pengendali Perseroan akan meminjamkan dana sebesar Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada Perseroan yang rencananya akan dilakukan pelunasan melalui proses PMHMETD Perseroan dan ASN akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya sebesar 6.699.647.184 (enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat). Proses pelunasan hak tagih ASN melalui proses PMHMETD Perseroan akan memperhatikan dan memenuhi ketentuan pasal 10 POJK 32/2015 terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan RUPS Perseroan kembali.

Proforma permodalan sebelum dan setelah PMHMETD

Proforma 1: Apabila seluruh masyarakat dan ASN melaksanakan seluruh haknya.

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Nilai Nominal Rp100,-			Nilai Nominal Rp100,-		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.752.000.000	275.200.000.000		18.054.195.240	1.805.419.524.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
ASN	837.455.898	83.745.589.800	43,78%	7.537.103.082	753.710.308.200	43,78%
Masyarakat	1.075.318.507	107.531.850.700	56,22%	9.677.866.563	967.786.656.300	56,22%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.912.774.405	191.277.440.500	100,00%	17.214.969.645	1.721.496.964.500	100,00%
Saham Dalam Portepel	839.225.595	83.922.559.500		839.225.595	83.922.559.500	

Proforma 2: Apabila seluruh masyarakat tidak melaksanakan haknya dan ASN melaksanakan seluruh haknya.

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Nilai Nominal Rp100,-			Nilai Nominal Rp100,-		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.752.000.000	275.200.000.000		18.054.195.240	1.805.419.524.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
ASN	837.455.898	83.745.589.800	43,78%	7.537.103.082	753.710.308.200	87,51%
Masyarakat	1.075.318.507	107.531.850.700	56,22%	1.075.318.507	107.531.850.700	12,49%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.912.774.405	191.277.440.500	100,00%	8.612.421.589	861.242.158.900	100,00%
Saham Dalam Portepel	839.225.595	83.922.559.500		9.441.773.651	944.177.365.100	

Pemegang Saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 88,89%.

4. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan akan menggunakan seluruh dana hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi untuk memberikan pinjaman kepada entitas anak yakni PT Telemedia Komunikasi Pratama, yang selanjutnya akan digunakan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama untuk modal kerja.

TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

1. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Pandemi yang menyebar sangat cepat ke seluruh wilayah Indonesia sejak awal Maret 2020 mengakibatkan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan. Ditengah penurunan atau melambatnya berbagai sektor usaha akibat pandemi Covid-19, sektor informasi dan komunikasi tetap mengalami pertumbuhan dan merupakan salah satu sektor usaha yang tahan terhadap dampak pandemi Covid-19.

Pemulihan ekonomi global khususnya perekonomian Indonesia mulai tumbuh di tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020 dan prakiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2022 akan lebih baik lagi.

Perkembangan ekonomi digital terutama *e-commerce* yang pesat, penyesuaian aktivitas masyarakat untuk beradaptasi di era new normal pasca pandemi Covid-19 turut mendorong pemanfaatan komunikasi yang semakin tinggi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Dengan melihat kondisi dan peluang tersebut diatas, Perseroan berinisiatif untuk terus meningkatkan dan mengembangkan usaha Perseroan dengan berencana memperluas jaringan penjualan data konektivitas ke daerah-daerah dengan menggunakan jaringan kabel serat optik di sepanjang jalur kereta api Indonesia.

Pertimbangan dilakukannya transaksi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman oleh pemegang saham pengendali diperlukan untuk memenuhi keperluan dana yang cepat dan murah dalam mendapatkan proyek sewa *fiber optic* dengan cepat dan terbatas di jalur kereta api.
2. Deposit atau uang jaminan sewa yang dibayarkan oleh TKP dimaksudkan untuk mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar dan memberikan kepastian sewa dalam jangka panjang.
3. Dengan mendapatkan sewa *fiber optic* dengan harga yang kompetitif, maka hal ini dapat mensinergikan dengan usaha Perseroan yang telah ada yakni penjualan data konektivitas internasional dan nasional ditambah dengan peluang usaha dalam sektor informasi dan komunikasi yang masih terbuka lebar.

Perseroan berkeyakinan bahwa transaksi ini dapat memberikan pertumbuhan kinerja keuangan yang baik dan optimal bagi Perseroan.

2. URAIAN TENTANG TRANSAKSI

Objek dan Nilai Transaksi

Objek Transaksi adalah

- Pinjaman dana dari ASN yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan kepada Perseroan sebanyak Rp 737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah, yang kemudian akan dipinjamkan kepada TKP, suatu entitas anak Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,67% (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh persen) dari seluruh saham dalam TKP dan selanjutnya akan digunakan oleh TKP untuk pembayaran deposit atau jaminan atas sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (*fiber optic*) kepada GLN dengan jumlah sebanyak Rp 737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Penyewaan aset berupa jaringan kabel serat optik (*Fiber Optic*) maksimal sebesar Rp1.474.233.600.000,- (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama, suatu entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99,67% kepada PT Gemilang Lintang Nusantara

Dengan memperhatikan POJK 17/2020, berikut persentase nilai transaksi terhadap ekuitas Perseroan dengan berdasar pada Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00025/2.0961/AU.1/05/0626-2/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 :

- Nilai Pinjaman dana dari ASN yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan kepada Perseroan sebanyak Rp 737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah, yang kemudian akan dipinjamkan kepada TKP dan selanjutnya akan digunakan oleh TKP untuk pembayaran deposit atau jaminan atas sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (*fiber optic*) kepada GLN dengan jumlah sebanyak Rp 737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) adalah 253,02% dari jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021. Transaksi Pinjaman dana dari ASN juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana POJK 42/2020.
- Nilai sewa jaringan kabel serat optik (*fiber optic*) maksimal sebanyak Rp1.474.233.600.000,- (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) adalah 506,04% dari jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021.

Transaksi tersebut diatas merupakan rangkaian transaksi dengan nilai maksimal sebanyak Rp1.474.233.600.000,- (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) yang merupakan 506,04% dari jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021.

Keterangan Singkat mengenai Perjanjian Pengakuan Utang Piutang Modal nomor 71/YELO-ASN/V/2022 Tanggal 30 Mei 2022.

Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan (Pihak Pertama) 2. ASN (Pihak Kedua)
Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama memerlukan tambahan dana untuk modal kerja Pihak Pertama dan/atau Entitas Anak dan oleh karenanya bermaksud untuk meminjam sejumlah dana dari Pihak Kedua; 2. Pihak Kedua merupakan pemegang saham dari YELO sebanyak 916.955.467 (sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh) lembar saham; 3. Pihak Kedua sepakat dan menyetujui untuk meminjamkan sejumlah dana kepada Pihak Pertama untuk modal kerja tersebut; 4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Pengakuan Utang Piutang dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Perjanjian ini.
Pernyataan Utang Piutang	Pihak Kedua dengan ini bersedia meminjamkan sejumlah dana kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan mengakui memiliki Utang kepada Pihak Pertama.
Nilai dan Peruntukan Utang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai pinjaman Pihak Pertama yang diberikan oleh Pihak

	<p>Kedua adalah sebanyak Rp 737.116.800.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) (untuk selanjutnya disebut sebagai “Utang”);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Utang tersebut merupakan setoran tunai yang diperuntukan untuk modal kerja Pihak Pertama dan/atau Entitas anak, yang akan diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara bertahap sampai dengan 30 Agustus 2022. 3. Untuk Utang tersebut, tidak terdapat pembebanan bunga atas Pinjaman yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
Jangka Waktu	Jangka waktu pelunasan Utang adalah 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dari Para Pihak.
Mekanisme Pengembalian Utang	Para Pihak sepakat bahwa mekanisme pengembalian Utang oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dapat dilakukan dengan pelunasan secara berkala selama Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana Lampiran I dan pelunasan tersebut dapat dipercepat sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
Penagihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua berhak menagih Utang tersebut kepada Pihak Pertama secara bertahap. 2. Untuk surat peringatan dengan juru sita atau keputusan pengadilan tidak diperlukan lagi dalam hal Pihak Pertama jatuh pailit, ditaruh di bawah pengampunan atau di likuidasi.
Hukum yang Berlaku	Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. 2. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat. 3. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan bilamana tidak dapat menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dalam waktu 30 hari kalender sejak pertemuan musyawarah pertama, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta

	Pusat.
--	--------

Keterangan:

- Tanggal Perjanjian adalah tanggal 30 Mei 2022 namun Perjanjian ini akan menjadi efektif setelah Perseroan mendapatkan persetujuan RUPS.
- Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berpotensi merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan.
- Perseroan akan melakukan prosedur terkait Penawaran Umum Terbatas (PUT) sebagaimana ketentuan POJK No. 32/2015.
- Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berpotensi menghalangi rencana PUT Perseroan dan penggunaan dananya.

Keterangan Singkat mengenai Pejanjian Pengajuan Utang Piutang antara Perseroan dan TKP nomor 72/TKP-YELO/V/tanggal 30 Mei 2022

Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. TKP (Pihak Pertama) 2. Perseroan (Pihak Kedua)
Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama memerlukan tambahan dana untuk modal kerja dan oleh karenanya bermaksud untuk meminjam sejumlah dana dari Pihak Kedua; 2. Pihak Kedua merupakan pemegang saham dari TKP sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham; 3. Pihak Kedua sepakat dan menyetujui untuk meminjamkan sejumlah dana kepada Pihak Pertama untuk modal kerja tersebut; 4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Pengakuan Utang Piutang dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Perjanjian ini.
Pernyataan Utang Piutang	Pihak Kedua dengan ini bersedia meminjamkan sejumlah dana kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan mengakui memiliki Utang kepada Pihak Pertama.
Nilai dan Peruntukan Utang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai pinjaman Pihak Pertama yang diberikan oleh Pihak Kedua adalah sebanyak Rp 737.116.800.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Utang"); 2. Utang tersebut merupakan setoran tunai yang diperuntukan untuk modal kerja Pihak Pertama, yang akan diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara bertahap sampai dengan 30 Agustus 2022. 3. Untuk Utang tersebut, Pihak Kedua tidak akan membebankan bunga kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 5

	Perjanjian ini.
Jangka Waktu	Jangka waktu pelunasan Utang adalah 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dari Para Pihak.
Mekanisme Pengembalian Utang	Para Pihak sepakat bahwa mekanisme pengembalian Utang oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dapat dilakukan dengan pelunasan secara berkala selama Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana Lampiran I dan pelunasan tersebut dapat dipercepat sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
Penagihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua berhak menagih Utang tersebut kepada Pihak Pertama secara bertahap. 2. Untuk surat peringatan dengan juru sita atau keputusan pengadilan tidak diperlukan lagi dalam hal Pihak Pertama jatuh pailit, ditaruh di bawah pengampuan atau di likuidasi.
Pengakhiran Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini berakhir apabila telah berakhir jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini dan/atau Pihak Pertama telah melunasi Utang dan pembayaran bunganya kepada Pihak Kedua. 2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian, Para Pihak secara tegas setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam alinea kedua dan ketiga Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut menghendaki adanya putusan pengadilan dalam hal pengakhiran perjanjian. 3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menyebabkan dikesampingkannya pelaksanaan hak dan kewajiban yang masih tertunda di antara Para Pihak.
Hukum yang Berlaku	Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. 2. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat. 3. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan bilamana tidak dapat

	menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dalam waktu 30 hari kalender sejak pertemuan musyawarah pertama, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Pusat.
--	---

Keterangan:

- Tanggal Perjanjian adalah tanggal 30 Mei 2022 namun Perjanjian ini akan menjadi efektif setelah Perseroan mendapatkan persetujuan RUPS.
- Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berpotensi merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan.
- Perseroan akan melakukan prosedur terkait Penawaran Umum Terbatas (PUT) sebagaimana ketentuan POJK No. 32/2015.
- Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berpotensi menghalangi rencana PUT Perseroan dan penggunaan dananya.

Keterangan singkat mengenai Pejanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Kabel Fiber Optik antara GLN dan TKP nomor NOMOR 52/GLN-TKP/V/2022 dan NOMOR 040/TKP-GLN/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.

Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. GLN 2. TKP
Ruang Lingkup Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama berkaitan dengan seluruh infrastruktur kabel <i>fiber optic</i> di Lokasi yang telah disepakati yakni seluruh lokasi infrastruktur yang disewakan oleh GLN kepada TKP demi menunjang terselenggaranya Perjanjian ini sesuai dengan Spesifikasi Teknis, dengan biaya sewa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini. 2. Kelengkapan fasilitas atas Infrastruktur yang Disewakan yang disewa oleh TKP adalah untuk tujuan yang berhubungan dengan pemakaian pada Lokasi dan/atau Lokasi Perangkat adalah akses selama 24 jam 7 hari seminggu, serta fasilitas keamanan, Jalur distribusi dan jalur kelistrikan. 3. GLN mengetahui, menyetujui dan mengizinkan TKP bekerja antara lain memasuki Lokasi, mengadakan, mengoperasikan dan memelihara Perangkat Telekomunikasi sesuai kebutuhan operasional TKP termasuk melakukan pemasaran kepada tenant di Lokasi.
Jangka Waktu Perjanjian	7 (tujuh) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini (" Jangka Waktu Perjanjian ").
Pemesanan atas Infrastruktur Jaringan Kabel Fiber Optik	<ol style="list-style-type: none"> 1. TKP akan menerbitkan Surat Perintah Kerja ("SPK") kepada GLN sehubungan dengan pemesanan atas Infastruktur Yang Disewakan di mana penyelesaian Pekerjaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK. 2. Sehubungan dengan adanya keterlambatan atas

	<p>BAST dan mengacu pada tata cara pembayaran dalam Perjanjian.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uang Jaminan wajib diberikan seluruhnya oleh TKP kepada GLN paling lambat tanggal 30 Agustus 2022.
Hukum yang Berlaku	Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	Setiap sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan bilamana tidak dapat menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dalam waktu 30 hari kalender sejak pertemuan musyawarah pertama, maka untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keterangan:

- Tanggal Perjanjian adalah tanggal 30 Mei 2022 namun Perjanjian ini akan menjadi efektif setelah Perseroan mendapatkan persetujuan RUPS.
- Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berpotensi merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan.
- Perseroan akan melakukan prosedur terkait Penawaran Umum Terbatas (PUT) sebagaimana ketentuan POJK No. 32/2015.
- Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berpotensi menghalangi rencana PUT Perseroan dan penggunaan dananya.

Infrastruktur Kabel Fiber Optik Proyek TKP

TKP berencana untuk melakukan pengembangan penjualan jaringan internet disepanjang jalur rel kereta api di pulau Jawa khususnya untuk daerah tier 2 dan tier 3. Untuk merealisasikan rencana pengembangan tersebut, TKP memerlukan jalur fiber optic yang terpasang di sepanjang rel kereta api. TKP berencana untuk melakukan penyewaan jalur fiber optic tersebut kepada GLN dengan panjang kabel fiber optic yaitu 2.800KM yang terdiri dari maksimal 10 Core. Jalur fiber optic ini melewati ± 4.291 Desa atau Kelurahan dengan ± 11.673.296 kepala keluarga (<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>) sehingga memberikan pangsa pasar yang sangat besar bagi TKP. Selain daripada itu tujuan TKP atas proyek ini yaitu untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kesenjangan internet yang terjadi saat ini di daerah tier 2 dan tier 3, sehingga dengan proyek ini TKP dapat menyalurkan jaringan internet dengan harga yang ekonomis kepada para masyarakat di daerah tier 2 dan tier 3 yang selama ini menjadi masalah bagi para penduduk di pedesaan.

Urgensi dibutuhkannya dana ini untuk kelangsungan kegiatan usaha TKP dan Perseroan cukup tinggi, karena jaringan fiber optic di jalur kereta api ini tidak selalu tersedia dikarenakan terbatasnya jaringan fiber optic yang terpasang di jalur rel kereta api. Kemudian dengan adanya proyek TKP ini, Perseroan yakin akan memberikan manfaat ekonomis yang tinggi bagi Perseroan dimasa yang akan datang dan menjamin kelangsungan usaha baik bagi TKP dan Perseroan.

1. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Berikut pihak-pihak yang melakukan transaksi:

- Pihak pemberi pinjaman kepada Perseroan : PT Artalindo Semesta Nusantara (“ASN”)
- Pihak penerima pinjaman dari ASN dan pemberi : PT Yeloo Integra Datanet Tbk.

4

- | | |
|--|---|
| pinjaman kepada TKP | ：“Perseroan”) |
| • Pihak penerima pinjaman dari Perseroan dan pembayar deposit/jaminan sewa | : PT Telemedia Komunikasi Pratama (“TKP”) |
| • Pihak penerima deposit/jaminan dan sewa | : PT Gemiliang Lintang Nusantara (“GLN”) |

Keterangan mengenai Perseroan

PT Yelooo Integra Datanet, Tbk. (“**Perseroan**”), suatu perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang usaha jasa, industri, perdagangan, pariwisata, dan transportasi namun kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh Perseroan antara lain bidang usaha jasa, perdagangan dan pariwisata, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Yelooo Integra Datanet No. 51 tanggal 18 Agustus 2016, dibuat oleh Drs. Suwongso Wijanto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) melalui Surat Keputusan No. AHU-0037807.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099020.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 016131. Perseroan bergerak dalam bidang usaha jasa, industri, perdagangan, pariwisata, dan transportasi dan Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2017.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 03 tanggal 25 November 2021, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhunkumham Republik Indonesia No.AHU-0067624.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 26 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208977.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 November 2021. (“**Anggaran Dasar Perseroan**”)

Pengurus Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Yelooo Integra Datanet, Tbk Nomor 2 Tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0014270 tanggal 7 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004127.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Januari 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Fadzri Sentosa

Komisaris Independen : Richy Syaputra Fani

Direksi

Direktur Utama : Wewy Suwanto

Direktur : Andi Lansirang Bharata

Direktur : Sunil Ramesh Tolani

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Jasa, Perdagangan, Pariwisata dan Transportasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- 1) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523);
- 2) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100);

- 3) Periklanan (73100);
- 4) Jasa Reservasi Lainnya Yang Berhubungan Dengan Itu Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (79990);
- 5) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209);
- 6) Aktivitas Perusahaan Holding (64200).

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:

- 1) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100);
- 2) Internet Service Provider (61921);
- 3) Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122);
- 4) Konstruksi Sentral Telekomunikasi (42206);
- 5) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce) (62012);
- 6) Aktivitas Konsultasi Pariwisata (70201);
- 7) Jasa Informasi Pariwisata (79911);
- 8) Jasa Informasi Daya Tarik Wisata (79912);
- 9) Jasa Interpreter Wisata (79922)

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang penyewaan modem termasuk penjualan data untuk konektivitas dan internet service provider melalui anak usahanya. Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2017.

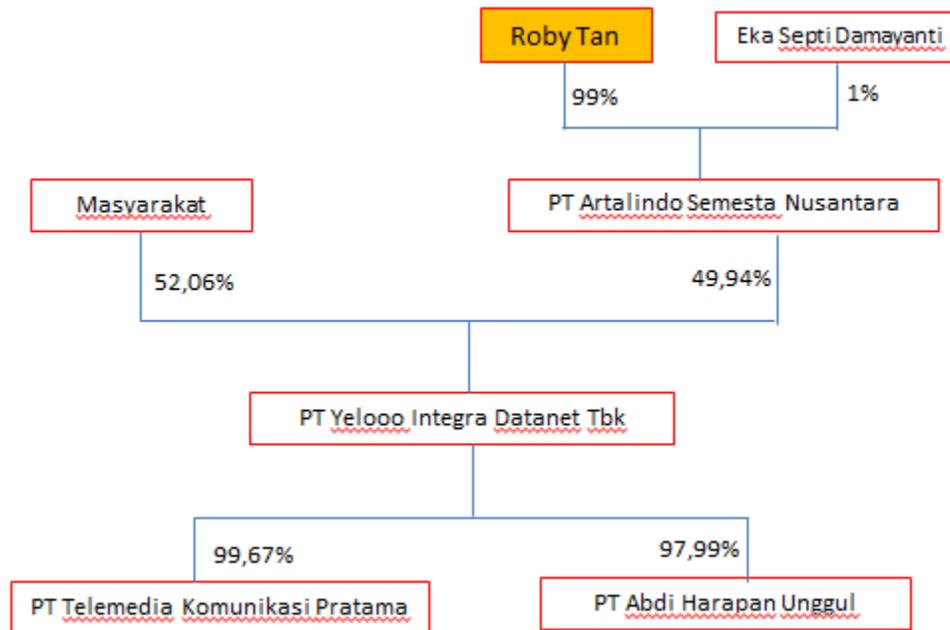
Struktur Permodalan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Direksi PT Yelooo Integra Datanet Tbk Nomor 03 Tanggal 25 November 2021 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0067624.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 26 November 2021, yang telah diterima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0478358 tanggal 26 November 2021, yang telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0478359 tanggal 26 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208977.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 November 2021 dan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan dengan persentase kepemilikan sedikitnya 5% dan masyarakat lainnya adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp100,- persaham)	(%)
Modal Dasar	2.752.000.000	275.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Artalindo Semesta Nusantara	837.455.898	83.745.589.800	43,782%
Masyarakat (kurang dari 5%)	1.075.318.507	107.531.850.700	56,218%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.912.774.405	191.277.440.500	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	839.225.595	83.922.559.500	

Pemilik manfaat Perseroan adalah Roby Tan

Berikut struktur Perseroan dari pemegang saham sampai dengan perusahaan anak



Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00025/2.0961/AU.1/05/0626-2/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan pendapat wajar dengan penekanan suatu hal, adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Keuangan	31 Desember 2021 (Diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
Jumlah Aset	293.288	99.559
Jumlah Liabilitas	1.960	1.799
Jumlah Ekuitas	291.328	97.760

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Keuangan	31 Desember 2021 (Diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
Pendapatan Bersih	500.079	159.931
Beban Pokok Pendapatan	(484.481)	(158.838)
Laba Kotor	15.498	1.093

Laba (Rugi) Tahun Berjalan	14.663	(1.637)
----------------------------	--------	---------

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan Bersih	212,68	37.101,15
Laba Kotor	1.317,07	2.715,89
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	995,70	1.123,56
Jumlah Aset	194,59	256,39
Jumlah Liabilitas	8,96	2.531,21
Jumlah Ekuitas	198,00	250,81
Rasio Usaha (%)		
Laba (Rugi) Kotor terhadap Pendapatan Bersih	3,10	0,68
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	2,93	-1,02
Rasio Solvabilitas (%)		
Liabilitas/Aset	0,67	1,81
Liabilitas/Ekuitas	0,67	1,84
Rasio Likuiditas (X)		
Current Ratio	113,91	27,23

Keterangan mengenai ASN

ASN merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 4 November 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ASN No. 05 tanggal 04 November 2019, dibuat oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0058527.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 06 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0212903.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 06 November 2019 (“**Akta Pendirian ASN**”) dan berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan alamat sebagai berikut: Jalan Bale Kambang No.333 RT.005 RW.003, BaleKambang Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, ASN belum terdapat perubahan atas anggaran dasarnya.

Kegiatan Usaha ASN

Kegiatan usaha ASN sebagaimana ditentukan dalam Akta Pendirian ASN, maksud dan tujuan ASN adalah berusaha dalam bidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis, perdagangan dan aktivitas Keuangan dan asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ASN dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis yaitu aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan antara lain:
- c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi yaitu aktivitas manajemen dana.
- d. ASN berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan ASN serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu ASN berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan ASN itu

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, ASN belum melakukan kegiatan secara operasional. ASN hanya berinvestasi pada anak usaha.

Susunan Pengurus ASN

Susunan pengurus ASN pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas ASN No. 126 tanggal 29 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan AHU-AH.01.03-0494481 tanggal 31 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234989.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris:

Komisaris : Saiful Hadi

Direksi:

Direktur Utama : Roby Tan

Direktur : Eka Septi Damayanti

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ASN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham ASN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Artalindo Semesta Nusantara Nomor 126 tanggal 29 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan AHU-AH.01.03-0494481 tanggal 31 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234989.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100.000,-per saham	%
Modal Dasar	1.500	150.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Roby Tan	396	39.600.000	99,00
2. Eka Septi Damayanti	4	4.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh	400	40.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.100	110.000.000	

Pemilik manfaat ASN adalah: Roby Tan

Sifat Hubungan Afiliasi Perseroan dengan ASN

ASN merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham per 25 Februari 2022 adalah sebesar 47,94% (empat puluh tujuh koma sembilan empat persen).

Keterangan mengenai TKP

TKP merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas TKP No. 44 tanggal 22 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013371.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 24 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor AHU-0035194.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Februari 2021 ("**Akta Pendirian TKP**") dan berdomisili di Kabupaten Karawang, dengan alamat sebagai berikut:

Ruko Galuh Blok D Nomor 6C, Kel. Sukaharja, Kec. Telukjambe, Kab. Karawang, Jawa Barat

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, TKP belum terdapat perubahan atas anggaran dasarnya.

Kegiatan Usaha TKP

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian TKP, maksud dan tujuan TKP adalah bergerak dalam bidang perdagangan, informasi dan komunikasi, industri pengolahan dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Sampai saat ini, kegiatan usaha TKP yang dijalankan adalah Internet Service Provider.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TKP

struktur permodalan dan susunan pemegang saham TKP sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham Perseroan Terbatas TKP No. 35 tanggal 11 Maret 2022, dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan perusahaan dan susunan pemegang saham TKP adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 1.000.000,-per saham	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Yelooo Integra Datanet Tbk	299	299.000.000	99,67
2. Sunil Ramesh Tolani	1	1.000.000	0,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh	300	300.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	700	700.000.000	

Pengambilalihan 99,67% saham TKP oleh Perseroan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2022 sebanyak 49% senilai Rp147.000.000 dan tanggal 7 Februari 2022 sebanyak 50,67% senilai Rp152.000.000. Pengambilalihan ini bukan Transaksi Material sebagaimana POJK 17/2020 dan juga bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dalam POJK 42/2020.

Susunan Pengurus TKP

Susunan pengurus TKP pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas TKP No. 05 tanggal 21 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Yunita Elysbeth Nainggolan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-03-0203048 tanggal 25 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059591.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Sunil Ramesh Tolani

Direksi
Direktur : Andi Lasinrang Bharata

Keterangan mengenai GLN

GLN merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 16 September 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas GLN No. 44 tanggal 16 September 2019, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046907.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 16 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor AHU-0170250.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 16 September 2019 dan berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan alamat sebagai berikut:

Jalan Kaji nomor 9B, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat

Perubahan Anggaran Dasar GLN terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Gemilang Lintang Nusantara No. 06 tanggal 19 November 2021, dibuat di hadapan Yunita Elysbeth Nainggolan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0065940.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 22 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor AHU-0204469.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 November 2021. ("**Anggaran Dasar GLN**").

Kegiatan Usaha GLN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GLN, maksud dan tujuan GLN adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Dan Eceran Bukan Mobil dan Motor, Perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan Aktifitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI.

Saat ini kegiatan usaha yang dijalankan GLN adalah penyelenggara jaringan tetap tertutup melalui media fiber optic terrestrial.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GLN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GLN sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham Perseroan Terbatas GLN No. 20 tanggal 4 September 2020, dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0382617 tanggal 7 September 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147023.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 september 2020 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH	NILAI NOMINAL	%
------------	--------	---------------	---

	SAHAM	Rp 100.000,-per saham	
Modal Dasar	30.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Leonard Soesanto	13.500	1.350.000.000	90,00
2. Wendy William	1.500	150.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh	15.000	1.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000	1.500.000.000	

Susunan Pengurus GLN

Susunan pengurus GLN pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas GLN No. 15 tanggal 3 September 2020, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0382615 tanggal 7 September 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147019.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 September 2020, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Komisaris : Wendy William

Direksi
 Direktur : Leonard Soesanto

Sifat Hubungan Afiliasi Perseroan dengan GLN

GLN tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Penjelasan, Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Pinjaman (Transaksi Afiliasi) oleh ASN Dibandingkan dengan Pihak Ketiga

Dalam kondisi saat ini, ditengah masih mewabahnya virus covid-19, Perseroan memerlukan pinjaman yang cepat untuk menangkap peluang di era digitalisasi dalam *new-normal* dengan berencana untuk meningkatkan usaha Perseroan melalui penjualan data konektivitas di daerah-daerah sepanjang jalur kereta api. ASN selaku pemegang saham pengendali Perseroan memberikan komitmennya untuk memberikan dukungan tambahan dana kas yang tepat dan cepat guna keperluan rencana peningkatan usaha Perseroan, sedangkan jika pinjaman dari pihak yang tidak terafiliasi atau pihak ketiga Perseroan memerlukan syarat dan waktu yang cukup panjang diantaranya untuk proses *due diligence* terlebih dahulu.

Pinjaman yang didapat dari ASN akan digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada entitas anak yakni PT Telemedia Komunikasi Pratama, yang selanjutnya akan digunakan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama untuk modal kerja dalam pengembangan usaha penjualan internet melalui jaringan kabel fiber optik.

Pengaruh Transaksi Pinjaman

Dengan adanya pinjaman dari ASN maka akan memperkuat modal kerja Perseroan yang akan digunakan untuk modal kerja entitas anak Perseroan.

RINGKASAN PENGARUH TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Laporan keuangan proforma konsolidasian semata-mata disusun untuk mencerminkan dampak keuangan material atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021, sehubungan dengan rencana-rencana Perusahaan untuk melakukan pengambilalihan saham TKP, penerimaan pinjaman dari ASN dan pemberian pinjaman ke TKP untuk uang muka deposit sewa jaringan kabel fiber optik kepada GLN.

Berikut dibawah ini adalah laporan keuangan proforma Perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian proforma tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah di reviu oleh KAP Morhan dan Rekan tertanggal 30 Mei 2022.

	Historis	Penyesuaian	Proforma
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	31.891.027.849	140.743.829	32.031.771.678
Piutang usaha - pihak ketiga	11.940.920	1.204.439.040	1.216.379.960
Piutang lain-lain - pihak ketiga	4.301.662.065	-	4.301.662.065
Persediaan	58.566.775.161	-	58.566.775.161
Pajak dibayar di muka	5.229.636.156	66.922.650	5.296.558.806
Biaya dibayar di muka	15.587.671	5.577.500	21.165.171
Uang jaminan pemasok	1.106.554.698	-	1.106.554.698
Piutang lain-lain – pihak ketiga bagian jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	17.500.000.000	-	17.500.000.000
Jumlah Aset Lancar	118.623.184.520	1.417.683.019	120.040.867.539
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain - pihak ketiga jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	46.066.341.782	-	46.066.341.782
Aset pajak tangguhan	920.789.904	88.352.323	1.009.142.227
Uang muka	-	59.040.000	59.040.000
Aset tetap - bersih	25.026.245.522	1.801.591.653	26.827.837.175
Aset hak guna - bersih	46.913.581	-	46.913.581
Aset tak berwujud	1.829.240.778	-	1.829.240.778
<i>Goodwill</i>	100.775.418.440	322.171.646	101.097.590.086
Uang jaminan proyek	-	737.116.800.000	737.116.800.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	174.664.950.007	739.387.955.622	914.052.905.629
JUMLAH ASET	293.288.134.527	740.805.638.641	1.034.093.773.168

	Historis	Penyesuaian	Proforma
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha - pihak ketiga	-	1.354.478.400	1.354.478.400
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	2.272.868.359	2.272.868.359
Utang pajak	229.841.798	7.769.380	237.611.178
Beban masih harus dibayar	708.860.561	53.800.000	762.660.561
Uang jaminan pelanggan	102.675.000	-	102.675.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.041.377.359	3.688.916.139	4.730.293.498
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang lain-lain	-	423.300.218.936	423.300.218.936
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	918.703.743	-	918.703.743
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	918.703.743	423.300.218.936	424.218.922.679
JUMLAH LIABILITAS	1.960.081.102	426.989.135.075	428.949.216.177
EKUITAS			
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal dasar - 2.752.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.912.774.405 saham pada tanggal 31 Desember 2021	191.277.440.500	-	191.277.440.500
Tambahan modal disetor	85.549.930.605	-	85.549.930.605
Ekuitas lainnya	-	313.816.581.064	313.816.581.064
Saldo laba	12.358.102.046	-	12.358.102.046
Sub-jumlah	289.185.473.151	313.816.581.064	603.002.054.215
Kepentingan non-pengendali	2.142.580.274	(77.498)	2.142.502.776
JUMLAH EKUITAS	291.328.053.425	313.816.503.566	605.144.556.991
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	293.288.134.527	740.805.638.641	1.034.093.773.168

	Historis	Penyesuaian	Proforma
PENDAPATAN BERSIH	500.078.998.848	-	500.078.998.848
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(484.580.936.431)	-	(484.580.936.431)
LABA KOTOR	15.498.062.417	-	15.498.062.417

Beban umum dan administrasi	(3.083.599.659)	-	(3.083.599.659)
Pendapatan (beban) lain-lain	7.323.829.798	-	7.323.829.798
LABASEBELUM PAJAK PENGHASILAN	19.738.292.556	-	19.738.292.556
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	(5.075.219.465)	-	(5.075.219.465)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	14.663.073.091	-	14.663.073.091
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(541.525.511)	-	(541.525.511)
Pajak penghasilan terkait	119.135.612	-	119.135.612
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH DIKURANGI PAJAK	(422.389.899)	-	(422.389.899)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	14.240.683.192	-	14.240.683.192
Jumlah Laba bersih yang dapat			
Pemilik entitas induk	14.484.475.672	-	14.484.475.672
Kepentingan non-pengendali	178.597.419	-	178.597.419
JUMLAH	14.663.073.091	-	14.663.073.091
Jumlah Laba komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	14.063.128.026	-	14.063.128.026
Kepentingan non-pengendali	177.555.166	-	177.555.166
JUMLAH	14.240.683.192	-	14.240.683.192

Keterangan	31 Des 2021	31 Des 2020
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan Bersih	212,68	37.101,15
Laba Kotor	1.317,07	2.715,89
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	995,70	1.123,56
Jumlah Aset	194,59	256,39
Jumlah Liabilitas	8,96	2.531,21
Jumlah Ekuitas	198,00	250,81
Rasio Usaha (%)		
Laba (Rugi) Kotor terhadap Pendapatan Bersih	3,10	0,68
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	2,93	-1,02
Rasio Solvabilitas (X)		
Liabilitas/Aset	0,67	1,81
Liabilitas/Ekuitas	0,67	1,84
Rasio Likuiditas (X)		
Current Ratio	113,91	27,23

Asumsi-asumsi dasar penyusunan proforma laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Biaya perolehan diukur dengan nilai nominal saham TKP yang dimiliki oleh pemegang saham TKP sebelum transaksi akuisisi. Jumlah saham yang di akuisisi sebanyak 299 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 per lembar saham, sehingga nilai transaksi yang dialihkan Grup untuk mengakuisisi sebanyak Rp299.000.000
- b. Transaksi perolehan saham TKP dicatat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 tentang "Kombinasi Bisnis". Sehubungan dengan hal tersebut, maka:
 1. Aset dan liabilitas yang diperoleh diukur dengan menggunakan nilai wajar sesuai dengan yang diatur PSAK tersebut.
 2. Selisih lebih antara nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan dengan nilai wajar aset dan liabilitas yang teridentifikasi diakui sebagai *Goodwill* pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma.

Perhitungan *Goodwill*:

Imbalan yang secara efektif dialihkan	299.000.000
---------------------------------------	-------------

Dikurangi:

Nilai Neto Aset dan Liabilitas teridentifikasi
PT Telemedia Komunikasi Pratama

i. Aset	3.355.444.772
ii. Liabilitas	<u>(3.378.616.419)</u>

Nilai Neto Aset dan Liabilitas teridentifikasi diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	<u>(23.171.646)</u>
--	---------------------

<i>Goodwill</i>	<u>322.171.646</u>
------------------------	---------------------------

- c. Grup menerima pinjaman dari ASN, Pemegang Saham sebesar Rp737.116.800.000 yang dicatat sebagai utang lain-lain pada bagian liabilitas jangka panjang yang diperuntukan untuk modal kerja dan akan dilunasi secara berkala selama jangka waktu perjanjian. Jangka waktu pelunasan pinjaman adalah 7 tahun dan tidak terdapat pembebanan bunga atas pinjaman tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas maka utang lain-lain harus diukur dengan nilai wajar sehingga saldo utang lain-lain sebanyak Rp737.116.800.000 akan dicatat sebanyak Rp423.300.218.936 dan dampak pengukuran menggunakan nilai wajar tersebut dicatat sebagai akun ekuitas lainnya sebesar Rp313.816.581.064 di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021.

- d. Perusahaan memberikan pinjaman sebanyak Rp737.116.800.000 kepada TKP untuk tambahan modal kerja yang akan dilunasi secara berkala selama jangka waktu perjanjian. Jangka waktu pengembalian adalah 7 tahun dan tidak terdapat pembebanan bunga atas pinjaman tersebut.
 - 1) Sehubungan dengan perjanjian di atas maka pinjaman yang diberikan Perusahaan kepada TKP sebanyak Rp737.116.800.000 dicatat sebagai piutang lain-lain dan diukur dengan nilai wajar sebanyak Rp423.300.218.936 dan dampak pengukuran menggunakan nilai wajar tersebut dicatat menambah saldo investasi di TKP sebanyak Rp313.816.581.064.

- 2) Selanjutnya, pinjaman yang diterima TKP dari Perusahaan dicatat sebagai utang lain-lain dan diukur dengan nilai wajar sehingga utang lain-lain sebesar Rp737.116.800.000 akan dicatat sebanyak Rp423.300.218.936 dan dampak pengukuran menggunakan nilai wajar tersebut dicatat sebagai akun ekuitas lainnya sebanyak Rp313.816.581.064 di laporan posisi keuangan TKP pada tanggal 31 Desember 2021.
 - 3) Tidak terdapat dampak atas poin 1 dan 2 pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut karena transaksi tersebut dieliminasi.
- e. TKP memberikan uang jaminan kepada GLN sebanyak Rp737.116.800.000 atau sebesar 50% dari total biaya sewa selama jangka waktu paling lama 7 tahun dari tanggal perjanjian 31 Maret 2022

RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan (selanjutnya disebut “KR”) sebagai penilai resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penawaran No. KR/220225-003 tanggal 25 Februari 2022, yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan 00106/2.0162-00/BS/05/0153/1/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, ASN, TKP, dan GLN.

Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah

- Transaksi dimana ASN merencanakan untuk meminjamkan sejumlah dana kepada Perseroan yang tidak terdapat bunga sebanyak Rp 737.116.800.000.
- Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk meminjamkan sejumlah dana kepada TKP yang tidak terdapat bunga sebanyak Rp 737.116.800.000.
- Transaksi dimana TKP merencanakan untuk melakukan kerjasama penyewaan jaringan kabel fiber optik yang dikomersialisasikan oleh GLN dengan segmentasi/lokasi dan panjang kabel fiber optik dengan jangka waktu selama tujuh tahun dengan keseluruhan jumlah harga sewa sebesar

Rp1.474.233.600.000 dengan uang jaminan sebesar 50,00% dari jumlah harga sewa, yaitu sebanyak Rp737.116.800.000.

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Mei 2020 (“**POJK 35/2020**”) serta Standar Penilaian Indonesia 2018.

Tanggal Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran atas Transaksi dalam Laporan Pendapat Kewajaran diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2021. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

I. Analisis atas Transaksi

Analisis atas Transaksi dilakukan berdasarkan informasi mengenai Transaksi yang diberikan oleh manajemen Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Transaksi dimana ASN merencanakan untuk meminjamkan sejumlah dana kepada Perseroan yang tidak terdapat bunga sebesar Rp 737.116.800.000. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, mengingat bahwa ASN merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 47,94%, maka transaksi Perseroan untuk menerima pinjaman sebesar Rp 737.116.800.000 dari ASN merupakan transaksi afiliasi, sehingga Perseroan harus memenuhi POJK No. 42/2020. Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 291.328.053.425. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Piutang antara Perseroan dan ASN tanggal 30 Mei 2022, nilai transaksi adalah sebesar Rp 737.116.800.000, dimana nilai transaksi tersebut mencerminkan lebih dari 50,00% ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sehingga berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, transaksi tersebut merupakan transaksi material, sehingga Perseroan harus memenuhi POJK No. 17/2020.
- Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk meminjamkan sejumlah dana kepada TKP yang tidak terdapat bunga sebesar Rp 737.116.800.000. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, mengingat bahwa TKP merupakan entitas anak Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,67%, maka transaksi pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada TKP sebesar Rp 737.116.800.000 merupakan transaksi afiliasi, sehingga Perseroan harus memenuhi POJK No. 42/2020. Namun demikian, pelaksanaan transaksi pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada TKP sebesar Rp 737.116.800.000 tersebut dikecualikan dari POJK No. 42/2020 berdasarkan ketentuan Pasal 6 butir 1).b.1., mengingat TKP merupakan entitas anak yang dimiliki oleh Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,67%. Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 291.328.053.425. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Piutang antara Perseroan dan TKP tanggal 30 Mei 2022, nilai transaksi adalah sebesar Rp 737.116.800.000, dimana nilai transaksi tersebut mencerminkan lebih dari 50,00% ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sehingga berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, transaksi tersebut merupakan transaksi material, sehingga Perseroan harus memenuhi POJK No. 17/2020.
- Transaksi dimana TKP merencanakan untuk melakukan kerjasama penyewaan jaringan kabel fiber optik yang dikomersialisasikan oleh GLN dengan segmentasi/lokasi dan panjang kabel fiber optik dengan jangka waktu selama tujuh tahun dengan keseluruhan jumlah harga sewa sebesar Rp1.474.233.600.000 dengan uang jaminan sebesar 50,00% dari jumlah harga sewa, yaitu sebesar Rp737.116.800.000. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, mengingat bahwa GLN merupakan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, maka transaksi dimana TKP merencanakan untuk melakukan kerjasama penyewaan jaringan kabel fiber optik yang dikomersialisasikan oleh GLN dengan segmentasi/lokasi dan panjang kabel fiber optik dengan jangka waktu selama tujuh tahun tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, berdasarkan laporan

keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 291.328.053.425. Selanjutnya, berdasarkan Pejianjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Kabel Fiber Optik antara GLN dan TKP tanggal 30 Mei 2022, TKP akan membayar uang jaminan kepada GLN sebesar Rp737.116.800.000 yang merupakan 50,00% dari keseluruhan jumlah harga sewa sebesar Rp1.474.233.600.000 sehingga berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, transaksi tersebut merupakan transaksi material, sehingga Perseroan harus memenuhi POJK No. 17/2020.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi dan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri internet yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri internet di dunia dan di Indonesia, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan dan TKP berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 - 2021 yang telah diaudit dan laporan keuangan TKP untuk periode sejak tanggal pendirian tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah diaudit.

KR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Transaksi yang ditinjau dari nilai tambah terhadap Perseroan berdasarkan proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 – 2029, dimana setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 – 2029, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya, KR juga melakukan analisis likuiditas, analisis kelayakan pelunasan utang, dan analisis *leverage* atas Transaksi yang ditinjau dari kemampuan likuiditas Perseroan, dimana berdasarkan proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 – 2029, Perseroan diperkirakan akan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran dan pelunasan atas Rencana Pinjaman kepada ASN.

III. Analisis Kelayakan Pelunasan Utang

Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Piutang antara Perseroan dan ASN, ASN merencanakan untuk meminjamkan sejumlah dana kepada Perseroan yang tidak terdapat bunga sebanyak Rp 737,12 miliar.

Selanjutnya, berdasarkan proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan yang disusun oleh manajemen Perseroan, proyeksi saldo kas dan setara kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 – 2029, Perseroan diperkirakan akan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman Perseroan kepada ASN sebanyak Rp 737,12 miliar, yaitu pada tahun 2029.

IV. Analisis Likuiditas

Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Piutang antara Perseroan dan ASN, ASN merencanakan untuk meminjamkan sejumlah dana kepada Perseroan yang tidak terdapat bunga sebanyak Rp 737,12 miliar.

Selanjutnya, berdasarkan proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan yang disusun oleh manajemen Perseroan, proyeksi saldo kas dan setara kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 – 2029, Perseroan diperkirakan akan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman Perseroan kepada ASN sebanyak Rp 737,12 miliar, yaitu pada tahun 2029.

V. Analisis Kelayakan Rencana Penggunaan Dana atas Transaksi Pinjam-Meminjam Dana

Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Piutang antara Perseroan dan ASN, ASN merencanakan untuk meminjamkan sejumlah dana kepada Perseroan yang tidak terdapat bunga sebesar Rp 737,12 miliar. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Piutang antara Perseroan dan TKP, Perseroan merencanakan untuk meminjamkan sejumlah dana kepada TKP yang tidak terdapat bunga sebanyak Rp 737,12 miliar, dimana TKP akan menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembayaran atas uang jaminan sewa fiber optik kepada GLN sebesar 50,00% dari jumlah harga sewa fiber optik, yaitu sebanyak Rp 737,12 miliar

Berdasarkan perhitungan nilai kini (*present value*) atas rencana TKP untuk melakukan rencana sewa fiber optik kepada GLN dengan uang jaminan sebesar 50,00% dari jumlah harga sewa, yaitu sebanyak Rp 737,12 miliar, diperoleh hasil bahwa *net present value* (NPV) rencana sewa fiber optik adalah sebanyak Rp 221,31 miliar dengan tingkat diskonto 9,15%. Selanjutnya, hasil perhitungan *internal rate of return* (IRR) rencana sewa fiber optik adalah sebesar 15,28% atau lebih besar dari biaya modalnya. Dengan demikian, rencana sewa fiber optik adalah layak.

VI. Analisis atas *Leverage*

Berdasarkan proyeksi laporan keuangan Perseroan, analisis *leverage ratio* atas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 – 2029 berkisar antara 1,71% - 291,95%.

VII. Analisis atas Kewajaran Transaksi

Analisis atas kewajaran Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Transaksi. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Analisis kuantitatif dilakukan dengan melakukan analisis perbandingan terhadap pinjaman beberapa perusahaan publik lainnya di dalam negeri dalam mata uang Rupiah, analisis likuiditas, analisis kelayakan pelunasan utang, analisis potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Transaksi yang ditinjau dari proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi serta potensi keuntungan atas selisih nilai transaksi dengan nilai kajian harga sewa fiber optik yang disusun oleh KJPP Sapto, Kasmodiard & Rekan (“SKR”) sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00002/2.0084-00/PI/05/0274/1/V/2022 tanggal 9 Mei 2022.

Analisis perbandingan terhadap pinjaman beberapa perusahaan publik lainnya di dalam negeri dalam mata uang Rupiah ditinjau berdasarkan perbandingan atas pinjaman-pinjaman yang diberikan

kepada berbagai perusahaan publik di dalam negeri dari perbankan dan lembaga keuangan dalam mata uang Rupiah sebagaimana telah dipublikasikan pada website Bursa Efek Indonesia, dimana berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Piutang antara Perseroan dan ASN tanggal 30 Mei 2022, tingkat suku bunga pada transaksi Perseroan untuk menerima pinjaman sebesar Rp 737.116.800.000 dari ASN akan dikenakan tingkat bunga sebesar 0,00% per tahun, tingkat suku bunga mana yang berada di bawah kisaran suku bunga pinjaman sejenis yang ada di perusahaan-perusahaan publik lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Analisis likuiditas dan analisis kelayakan pelunasan utang atas Transaksi yang ditinjau dari kemampuan likuiditas Perseroan, dimana berdasarkan proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 – 2029, Perseroan diperkirakan akan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran dan pelunasan atas Rencana Pinjaman kepada ASN.

Analisis potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Transaksi ditinjau dari proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi serta potensi keuntungan atas selisih nilai transaksi dengan nilai kajian harga sewa fiber optik yang disusun oleh KJPP SKR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00002/2.0084-00/PI/05/0274/1/V/2022 tanggal 9 Mei 2022.

Berdasarkan analisis atas proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi, proyeksi jumlah pendapatan bersih konsolidasian dan laba bersih tahun berjalan konsolidasian Perseroan sebelum Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp 7,96 triliun dan Rp 0,35 triliun. Selanjutnya, proyeksi jumlah pendapatan bersih konsolidasian dan laba bersih tahun berjalan konsolidasian Perseroan setelah Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp 11,39 triliun dan Rp 1,46 triliun. Dengan demikian, berdasarkan proyeksi laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan tersebut, maka setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba bersih tahun berjalan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 – 2029, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Kabel Fiber Optik, TKP merencanakan untuk melakukan kerjasama penyewaan jaringan kabel fiber optik yang dikomersialisasikan oleh GLN dengan segmentasi/lokasi dan panjang kabel fiber optik dengan jangka waktu selama tujuh tahun dengan harga sewa fiber optik per pair sebesar Rp 626.800/km/bulan. Selanjutnya, berdasarkan laporan kajian kewajaran harga sewa fiber optik per 31 Desember 2021 yang disusun oleh KJPP SKR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00002/2.0084-00/PI/05/0274/1/V/2022 tanggal 9 Mei 2022, harga sewa fiber optik per pair adalah sebesar Rp 667.000/km/bulan. Dengan demikian, harga sewa fiber optik sebesar Rp 626.800/km/bulan adalah lebih rendah dari kajian harga sewa fiber optik sebesar Rp 667.000/km/bulan, sehingga TKP berpotensi membukukan keuntungan. Selisih nilai transaksi sebesar 6,03% tersebut telah sesuai dengan POJK No. 35/2020, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari kajian harga sewa fiber optik sebesar Rp 667.000/km/bulan.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **tidak wajar**. Hal ini disebabkan bahwa berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Piutang antara Perseroan dan ASN tanggal 30 Mei 2022, tingkat suku bunga pada transaksi Perseroan untuk menerima pinjaman sebesar Rp 737.116.800.000 dari ASN akan dikenakan tingkat bunga sebesar 0,00% per tahun, tingkat suku bunga mana yang berada di bawah kisaran suku bunga pinjaman sejenis yang ada di perusahaan-perusahaan publik lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:
 - a) Rencana Transaksi Tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
 - b) Semua informasi dalam keterbukaan informasi tanggal 13 Mei 2022, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
 - c) Rencana Transaksi memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

- (2) Selanjutnya Direksi Perseroan menyatakan bahwa :
 - a) Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 dan POJK No.42/2020
 - b) Rencana Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang memadai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 POJK 42/2020.
 - c) Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan dengan pihak lain termasuk Kreditur tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang mewajibkan Perseroan melakukan pemberitahuan atau permohonan persetujuan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Rencana Transaksi.
 - d) Perseroan sampai saat ditandatangani surat pernyataan ini tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.
 - e) Keterbukaan Informasi ini disusun untuk Rencana Transaksi yang merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020 yang harus memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB dan RUPS Independen pada

Hari/tanggal : 14 Juli 2022

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Axa Tower, Lantai 28, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan-12940

Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir

- RUPSLB : seluruh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB.
- RUPS Independen : seluruh Pemegang Saham Independen Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS Independen.
- Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan transaksi Perseroan dan:
- a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali
 - b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali

Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT II") berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - c. Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
 - d. Menetapkan penggunaan dana PMHMETD
 - e. Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas HMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

RUPSLB Pertama

Untuk mata acara ke-1, berlaku ketentuan Pasal 42 huruf a dan b POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Untuk mata acara ke-2 dan 3 berlaku ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 2 (1) huruf a dan c anggaran dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

RUPSLB Kedua

Untuk mata acara ke-1, berlaku ketentuan Pasal 42 huruf c dan d POJK No.15/POJK.04/2020 serta Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum rapat tidak tercapai maka, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Untuk mata acara ke-2 dan 3 berlaku ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf b dan c POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 2 (1) huruf b dan c anggaran dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

RUPSLB Ketiga

Untuk mata acara ke-1, berlaku ketentuan Pasal 42 huruf e POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 3 huruf e Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Untuk mata acara ke-2 dan 3 berlaku ketentuan Pasal 41 ayat 2 POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 2 (2) anggaran dasar Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan pada RUPSLB diatas sudah mencakup keseluruhan mata acara RUPSLB.

Mata Acara RUPS Independen

Persetujuan atas rencana rangkaian transaksi berupa

- penerimaan pinjaman oleh PT Artalindo Semesta Nusantara yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan kepada Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar

Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang kemudian akan dipinjamkan kepada PT Telemedia Komunikasi Pratama, suatu entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99,67% yang kemudian akan digunakan untuk pembayaran deposit atau jaminan atas sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (*Fiber Optic*) kepada PT Gemilang Lintang Nusantara dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi berdasarkan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

- sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (*Fiber Optic*) maksimal sebesar Rp1.474.233.600.000,- (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama, suatu entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99,67% kepada PT Gemilang Lintang Nusantara

Sesuai dengan Pasal 44 huruf a dan b POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 5 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

RUPS Independen Kedua

Dengan memperhatikan Pasal 44 huruf c dan d POJK No.15/POJK.04/2020 serta Pasal 22 ayat 5 huruf c dan d Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum rapat tidak tercapai maka, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS

RUPS Independen Ketiga

Sesuai dengan Pasal 44 huruf e dan f POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 5 huruf e dan f Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua diatas tidak tercapai, RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Yelooo Integra Datanet Tbk
Jl. Alaydrus No.66 BC
Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat 10150
Telepon: +62 21 6317523
Website: www.passpod.com
Email: corsec@passpod.com